

SEJARAH MASA PEMERINTAHAN GUBERNUR JENDERAL H.W. DAENDELS DAN JAN WILLEM JANSSENS DI PULAU JAWA 1808-1811M

Oleh: **Aries Kurniawan**¹, **Samodro**²
Program Studi Desain Komunikasi Visual^{1, 2},
Itenas Bandung¹, Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan²
E-Mail: ariskurniawan@itenas.ac.id¹, uga.fadly@yahoo.com²

Abstrak

Bangsa Indonesia memiliki perjalanan sejarah panjang, mulai jaman Sunda Besar, kolonialisme Portugis, Spanyol, VOC, Hindia Timur (Belanda Ppublik Bataaf-Perancis), Kerajaan Inggris (EIC), Hindia Belanda, Pendudukan Tentara Jepang, Perjuangan Kemerdekaan, NKRI, hingga sampai ke masa millennium ke-3 dewasa ini. Namun sangat disayangkan hanya sebagian kecil saja dari bangsa ini yang mengerti dan memahami “nilai” yang berada dibalik berbagai peristiwa sejarah tersebut. Oleh sebab itu, “kesadaran sejarah sebuah bangsa” hendaknya mendapat “perhatian yang sungguh-sungguh”, agar masyarakat memahami perjalanan sejarah bangsanya. Berbagai peristiwa yang dialami oleh bangsa Indonesia di masa lampau merupakan pengalaman sejarah yang sangat penting dan berharga. Istilah “Hindia Timur” digunakan untuk menyebut wilayah koloni Kerajaan Belanda yang berada di wilayah Asia. Istilah ini digunakan oleh bangsa Eropa lainnya, seperti; Inggris (East Indie), Belanda (Oost Indie) maupun Perancis (Indie Orientale). Berdasarkan laporan yang dibuat Daendels, sebelum kedatangannya ke P. Jawa, wilayah Hindia Timur meliputi wilayah P.Jawa, kepulauan Maluku, Makassar di P. Sulawesi, dan beberapa wilayah lain seperti Palembang di P.Sumatera, Banjarmasin di P. Kalimantan dan sejumlah pulau lain seperti Sumbawa, Bangka, Belitung, Timor dan Seram. Semua wilayah koloni ini berada di bawah kekuasaan gubernur jenderal dan Dewan Hindia (Raad van Indie) yang berkedudukan di Batavia. Sementara itu, wilayah P.Jawa, terbagi menjadi empat wilayah administratif yakni Batavia, Kesultanan Cirebon, wilayah Pantai Timur Laut Jawa (Noord-Oostkust), dan Ujung Timur pulau Jawa (Oosthoek). Berbagai peristiwa sejarah mengajarkan bukti mengenai “kebenaran” dan “kesalahan”, untuk dijadikan pengalaman, bahan renungan, pedoman sekaligus pegangan hidup bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan hari ini dan merencanakan masa depan. Bung Karno dalam salah satu pidatonya berpesan pada seluruh rakyat Indonesia agar “Jangan sekali – sekali melupakan sejarah”, dan lebih populer dengan istilah “Jas Merah”. Dengan kata lain sejarah harus menjadi pedoman, bahwa hari ini kita harus mempersiapkan generasi yang unggul demi keberlangsungan Bangsa Indonesia di masa depan

Kata Kunci: Peristiwa, Sejarah, Nilai.

PENDAHULUAN

Sejarah merupakan sebuah disiplin ilmu yang rumit, salah satu kerumitannya terletak pada hubungan antar peristiwa. Satu peristiwa yang terjadi di belahan bumi yang lain akan berdampak terhadap wilayah berbeda di belahan bumi lainnya. Keterkaitan antar peristiwa ini menciptakan hubungan sebab akibat (kausatif). Untuk mempelajari dan mendalami

kesejarahan, senantiasa harus memperhatikan dengan cermat mengenai rangkaian keseluruhan peristiwa, kompleksitas peristiwa, hubungan, kepekaan, kemampuan imajinasi dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda, serta selalu mencermati berbagai unsur detail yang berada di dalamnya.

Kompleksitas hubungan antar peristiwa tersebut menjadi pokok pembahasan dalam penelitian sejarah. Berbagai peristiwa yang terjadi di benua Eropa berakibat besar terhadap bangsa-bangsa Asia yang menjadi koloni bangsa – bangsa Eropa. Napoleon Bonaparte berkuasa di Perancis melalui kudeta 18 Brumaire tahun ke-VIII berdasarkan Kalender Republik Perancis (9 November 1799 M). Dalam waktu yang “relatif singkat” berhasil merestorasi sistem angkatan bersenjata Kekaisaran Republik Perancis. Secara mengejutkan pula berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga meliputi hampir seluruh wilayah benua Eropa. Peperangan yang dikobarkan oleh kaisar Napoleon Bonaparte (tahun 1799-1815 M) di Eropa tersebut, bertujuan untuk mempersatukan seluruh wilayah benua Eropa di bawah kekuasaan kekaisaran Perancis.

Sebagai akibat dari ekspansionisme Kaisar Napoléon Bonaparte di Eropa, posisi Belanda menjadi sangat strategis. Wilayah Belanda merupakan satu-satunya akses bagi Inggris untuk mendaratkan pasukannya ke Eropa Barat. Oleh karena itu, Napoléon melihat betapa pentingnya posisi Belanda bagi Perancis. Setelah beberapa kali wilayah Belanda digempur oleh armada Inggris, pada 5 Juni 1806 Napoléon memanggil anggota parlemen Republik Bataaf ke istana Tuilleries di Paris, dan memutuskan untuk mengubah sistem pemerintahan di Belanda dari bentuk Republik menjadi kerajaan kembali. Perubahan sistem pemerintahan ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dalam bidang militer, politik dan administrasi pemerintahan, khususnya dalam upaya menghadapi Inggris.

Kaisar Napoléon Bonaparte menyatakan bahwa tidak ada seorang pun mampu untuk memimpin Belanda saat itu, dan akan mempercayakan kekuasaan wilayah Belanda kepada orang Perancis, yang sudah teruji loyalitas dan kemampuannya. Pilihannya jatuh pada Louis Napoléon Bonaparte, adik kandungnya sendiri. Louis saat itu masih aktif dalam dinas kemiliteran Kekaisaran Perancis Grande Armée yang berpangkat Jenderal, dan kemudian dilantik menjadi Raja Belanda. Pada tanggal 23 Juni 1806 Raja Louis dan permaisurinya Hortense tiba di Den Haag dan memulai pemerintahannya.

Perang Napoleon ini telah merubah peta kekuasaan dan wilayah kerajaan-kerajaan besar di benua Eropa, termasuk wilayah koloninya. Ketika kekaisaran Perancis menguasai Belanda, maka “secara otomatis” wilayah jajahannya (termasuk Kepulauan Hindia Timur- nama wilayah sebelum Hindia Belanda - Indonesia sekarang) menjadi milik Perancis. Namun ternyata Perancis tidak mampu melawan kerajaan Britania Raya, kekaisaran Rusia dan koalisi kerajaan-kerajaan di benua Eropa lainnya. Perang Napoleon berakhir ketika Perancis gagal dalam penyerbuan ke wilayah Rusia, dan mengalami kekalahan besar dalam pertempuran Waterloo (Belgia) melawan pasukan koalisi kerajaan-kerajaan Eropa. Pertempuran Waterloo ini terjadi pada 18 Juni 1815 M, dan setelah itu disepakatilah pakta Paris II untuk menyelesaikan berbagai persoalan pasca perang Napoleon.

Perang Napoleon (Napoleonic War/Guerres Napoleoniennes) di Eropa telah merenggut korban sekitar hingga 6.500.000 jiwa. Perubahan ini mengakibatkan Hindia Timur berada di bawah kekuasaan kerajaan Britania Raya, sebagai pihak yang menang dalam perang Napoleon. Setelah Perancis kalah perang, pihak kerajaan Belanda menuntut pengembalian wilayah koloni yang pernah dikuasainya kepada kerajaan Britania Raya. Hal ini diakibatkan kemenangan Britania Raya atas Perancis dalam perang Napoleon, dan sekaligus menguasai wilayah koloni Perancis, yang diantaranya pernah dikuasai oleh pihak pemerintah kolonial Belanda. Proses diplomasi yang berlarut-larut ini kemudian menghasilkan beberapa “Perjanjian” yang menentukan nasib wilayah Hindia Timur.

Sepanjang catatan sejarah Indonesia pada masa awal abad 19 M merupakan periode yang sangat penting. Pada masa itu, wilayah Hindia Timur berada di bawah kekuasaan 3 negara besar Eropa, yaitu Republik Bataaf (1795—1806), Kekaisaran Perancis (1806—

1811), dan kerajaan Britania Raya / Inggris (1811—1816). Situasi politik dan ekonomi di Hindia Timur (istilah sebelum Hindia Belanda), pada akhir abad 18-19 M sangat sulit. Hal ini terjadi sebagai akibat dari perseteruan antara Inggris dan Perancis di Eropa. Rivalitas kedua negara adidaya tersebut berdampak di Hindia Timur berupa blokade laut yang dilakukan oleh Inggris atas P. Jawa. Dengan terjadinya blokade itu, pemerintahan Republik Bataaf di Belanda berupaya untuk memperkuat pulau Jawa dengan cara melakukan organisasi militer di wilayah koloni ini. Pada saat itu Republik Bataaf merupakan negara satelit yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah Perancis. Tahun 1811 merupakan akhir dari penulisan penelitian ini, karena wilayah koloni Hindia Timur secara resmi menjadi “milik” Inggris sebagai konsekuensi kekalahan Belanda-Perancis dan ditandatangani Kapitulasi Tuntang.

LATAR BELAKANG

Didalam ilmu sejarah dilakukan penyelidikan mengenai perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Sejarah adalah menjelaskan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yaitu menyangkut perubahan yang nyata pada kehidupan manusia, mulai dari ilmu sejarah terbentuknya bumi, perubahan peradaban manusia dari masa ke masa, terbentuknya suatu negara yang merdeka dan berdaulat, hingga sejarah berdirinya bangunan kuno yang menjadi saksi suatu peristiwa. Dari keilmuan sejarah maka dapat ditemukan nilai-nilai yang menjadi pembelajaran tersendiri bagi kehidupan manusia.

Didalam memahami “nilai sejarah” maka ditemukan hal-hal dibalik berbagai peristiwa sejarah. Oleh karena itu, Ir, Soekarno, telah memberikan contoh bagaimana pentingnya menghargai sejarah peradaban bangsa sendiri. Beliau telah menyadari bahwa pemahaman sejarah dapat menjadi pijakan dalam membangun mentalitas bangsa kedepan. Pemahaman sejarah mengenai kejayaan masa silam di bumi Nusantara dapat menjadi motivasi dalam membangun mentalitas bangsa. Beliau bahkan menginisiasi pemberian nama-nama perguruan tinggi di Indonesia dengan nama-nama yang mengingatkan kejayaan Nusantara masa silam, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Tarumanagara, Universitas Airlangga dan lain lain. Tujuan dari pemberian nama-nama tersebut adalah agar sejarah kejayaan masa silam selalu diingat oleh generasi mendatang.

Sejarah kejayaan masa silam Indonesia memiliki kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian yang berbudaya kuat, berdaulat, dan bermartabat. Dalam salah satu pidatonya, Beliau berpesan pada seluruh rakyat Indonesia agar “Jangan sekali – sekali melupakan sejarah”, dan lebih populer dengan istilah “Jas Merah”. Didalam sejarah kejayaan dan keruntuhan peradaban bangsa masa lalu maka dapat digunakan sebagai acuan masa lalu dalam menyusun rencana pembangunan peradaban bangsa di masa depan. Banyak bukti sejarah yang menjelaskan bahwa peradaban bangsa Indonesia di masa lalu lebih maju dari bangsa Eropa. Namun ironinya, kedatangan bangsa Eropa di bumi Nusantara telah menciptakan penjajahan di Nusantara.

Salah satu sejarah mengenai kedatangan bangsa-bangsa Eropa adalah sejarah masa pemerintahan Gubernur Jenderal H.W. Daendels dan Jan Willem Janssens di Pulau Jawa 1808-1811M. Sejarah ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan bangsa kedepan. Meskipun bangsa Eropa telah melakukan kolonisasi di Nusantara, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian penggalan sejarah kolonial meninggalkan manfaat bagi kehidupan bangsa Indonesia. Salah satunya peninggalan Daendels di Indonesia adalah membuat jalan raya Anyer-Panarukan (Jalan Pos) yang panjangnya 1000 KM. Disamping itu salah satu peninggalan Daendels yang masih bisa dirasakan manfaatnya sampai sekarang adalah sistem wajib militer, dikenakannya pajak tanah, pembangunan pabrik senjata di Semarang serta pembangunan waduk Jatiluhur. Sedangkan pada masa pemerintahan penerusnya yakni Janssen cenderung singkat. Pada masa pemerintahannya, Janssen berusaha untuk memperbaiki keadaan Hindia Belanda yang telah ditinggalkan oleh Daendels. Sama

seperti Daendels, Janssen juga mengemban tugas utama, yaitu untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Sejarah dari dua era pemerintahan kolonial tersebut menarik untuk dibahas dari aspek sejarah. Disamping itu, pemerintahan era dua penguasa kolonial tersebut terkait dengan situasi politik internasional yang memberikan dampak pada bumi Nusantara sebagai daerah jajahannya

RUMUSAN MASALAH

Kesadaran sejarah sebuah bangsa hendaknya mendapat “perhatian yang sungguh-sungguh”, agar masyarakat memahami perjalanan sejarah bangsanya. Beberapa rumusan masalah dalam artikel ini adalah”:

1. Bagaimana perang di Eropa berpengaruh terhadap perkembangan di Hindia-Belanda?
2. Bagaimana perubahan situasi di Eropa (politik internasional) yang juga berimbas ke kawasan Asia Tenggara, sebagai dampak persaingan dagang antara Belanda dan Inggris?
3. Bagaimana peran Gubernur Jenderal H.W. Daendels dan Jan Willem Janssens di Pulau Jawa sebagai perpanjangan penguasa kolonial?
4. Apa dampak yang dihasilkan dari dua penguasa Gubernur tersebut yang dapat dirasakan manfaatnya hingga saat ini?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan mempelajari sejarah masa Pemerintahan Gubernur Jenderal H.W. Daendels dan Jan Willem Janssens di Pulau Jawa yakni:

1. Dapat membantu memahami situasi praktek kolonisasi di pulau Jawa pada masa lampau.
2. Memahami sejarah masa kolonial sehingga dapat berkontribusi pada pemahaman moral, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan sikap nasionalisme dan menghargai sejarah bangsa.
3. Dapat memahami sejarah kolonial pada masa Gubernur Jenderal H.W. Daendels dan Jan Willem Janssens di Pulau Jawa guna memberikan pengalaman dan masa depan yang lebih baik.

METODE PENGEMBANGAN

Suatu metode diperlukan dalam penulisan kisah sejarah untuk mendapatkan tulisan yang sistematis dan objektif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Menurut Gottschalk (1975:32) yang dimaksud dengan metode sejarah adalah:

1. Proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Lubis, 2011:2). peristiwa pada masa lalu dapat kita hadirkan kembali dengan cara merekonstruksi peristiwa itu dari jejak – jejak masa lampau yang disebut sumber (Historical Sources) (Lubis, 2011:7).

Sumber sejarah menurut bentuknya digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Sumber Tertulis
- b. Sumber lisan
- c. Sumber benda (artefak) (Gottschalk, 1975: 35-36; Kuntowijoyo, 1995: 94-96; Dalam Lubis, 2011: 7).

Adapun Menurut Asal Usulnya, Sumber Sejarah Digolongkan Menjadi Sumber:

- a. Primer
- b. Sekunder
- c. Tersier (Garraghan, 1946: 107; Alfian, 2000: 9; Dalam Lubis, 2011:9-10).

Menghadirkan kembali peristiwa pada masa lampau bukan berarti kita mengulang atau menampilkan kembali peristiwa atau tokoh-tokoh peristiwa tersebut secara nyata, melainkan menghadirkannya melalui tulisan peristiwa pada masa lampau.

Tahapan

1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani "heuriskein" yang berarti menemukan atau memperoleh (Renier, 1997:113 Dalam Lubis, 2011:17). Sejarawan Nina Herlina Lubis (2011:15) mendefinisikan heuristik sebagai tahapan / kegiatan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, jejak masa lampau. Jadi, heuristik merupakan tahapan proses mengumpulkan sumber – sumber sejarah. Di samping sumber tertulis, terdapat pula sumber lisan. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah lisan merupakan cerita-cerita tentang pengalaman kolektif yang disampaikan secara lisan (Dienaputra, 2006:12). Sejarah lisan diperlukan untuk melengkapi sumber – sumber tertulis. Dalam sejarah lisan, terdapat informasi – informasi yang tidak tercantum dalam sumber – sumber tertulis. Untuk mendapatkan informasi – informasi itu, penulis harus melakukan wawancara dengan narasumber yang disebut sebagai pengkisah dengan menggunakan alat rekam (Dienaputra, 2006:35).

2. Kritik

Sumber – sumber yang telah diperoleh melalui tahapan heuristik, selanjutnya harus melalui tahapan verifikasi. Terdapat dua macam kritik, yakni :

- a. Kritik ekstern untuk meneliti otentisitas atau keaslian sumber,
- b. Kritik intern untuk meneliti kredibilitas sumber (Kuntowijoyo, 2005: 100).

Singkatnya, tahapan kritik ini merupakan tahapan untuk memilih sumber – sumber asli dari sumber – sumber palsu. Untuk mendapatkan fakta sejarah, perlu melakukan proses koraborasi, yakni pendukungan suatu data dari suatu sumber sejarah dengan sumber lain (dua atau lebih), dimana tidak ada hubungan kepentingan di antara sumber-sumber tersebut, atau sumber bersifat merdeka (Herlina, 2011: 34).

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahapan / kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna dan hubungan dari fakta-fakta yang diperoleh (Herlina, 2011:15). Terdapat dua macam interpretasi, yakni analisis yang berarti menguraikan dan sintesis yang berarti menyatukan. Melalui tahapan interpretasi inilah, kemampuan intelektual seorang sejarawan benar – benar diuji. Sejarawan dituntut untuk dapat berimajinasi, bagaimana peristiwa pada masa lalu terjadi. Imajinasi seorang sejarawan berdasarkan fakta sejarah yang ada.

4. Historiografi

Historiografi (Gottschalk, 2006:39) adalah rekonstruksi yang imajinatif masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Dalam melakukan penulisan sejarah, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan.

- a. Penyeleksian atas fakta-fakta, untaian fakta-fakta, yang dipilihnya berdasarkan dua kriteria: relevansi peristiwa-peristiwa dan kelayakannya.
- b. Imajinasi yang digunakan untuk merangkai fakta-fakta yang dimaksudkan untuk merumuskan suatu hipotesis (Reiner, 1997:194 dalam Herlina, 2011:57).

Kronologis. dalam tahapan historiografi inilah, seluruh imajinasi dari serangkaian fakta yang ada dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Potongan – potongan fakta sejarah ditulis hingga menjadi sebuah tulisan peristiwa sejarah yang kronologis.

Tahapan metode sejarah mempermudah sejarawan dalam melakukan penelitian. Mulai dari proses pengumpulan sumber – sumber, memilih sumber – sumber asli, menginterpretasikan sumber – sumber, hingga penulisan sejarah.

1. Tahapan Penelitian Sejarah

Pertama yang harus dilakukan adalah menentukan topik penelitian dengan tujuan agar dalam melakukan pencarian sumber-sumber sejarah dapat terarah dan tepat sasaran. Pemilihan topik penelitian dapat didasarkan pada unsur-unsur berikut ini:

- a. **Bernilai**
Peristiwa sejarah yang diungkap tersebut harus bersifat unik, kekal, abadi.
- b. **Keaslian (Orisinalitas)**
Peristiwa sejarah yang diungkap hendaknya berupa upaya pembuktian baru atau ada pandangan baru akibat munculnya teori dan metode baru
- c. **Praktis dan Efisien**
Peristiwa sejarah yang diungkap terjangkau dalam mencari sumbernya dan mempunyai hubungan yang erat dengan peristiwa itu.
- d. **Kesatuan**
Unsur-unsur yang dijadikan bahan penelitian itu mempunyai satu kesatuan ide.

2. Langkah-Langkah Dalam Penelitian Sejarah

Setelah menentukan topic penelitian selanjutnya meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. **Heuristik (Pengumpulan Data)**
Heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah untuk berburu dan mengumpulkan berbagai sumber data yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, misalnya dengan melacak sumber sejarah tersebut dengan meneliti berbagai dokumen, mengunjungi situs sejarah, mewawancarai para saksi sejarah.
- b. **Kritik (Verifikasi)**
Kritik merupakan kemampuan menilai sumber-sumber sejarah yang telah dicari (ditemukan). Kritik sumber sejarah meliputi kritik ekstern dan kritik intern.

Kritik Ekstern

Kritik ekstern di dalam penelitian ilmu sejarah umumnya menyangkut keaslian atau keotentikan bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber sejarah, seperti prasasti, dokumen, dan naskah. bentuk penelitian yang dapat dilakukan sejarawan, misalnya tentang waktu pembuatan dokumen itu (hari dan tanggal) atau penelitian tentang bahan (materi) pembuatan dokumen itu sendiri. sejarawan dapat juga melakukan kritik ekstern dengan menyelidiki tinta untuk penulisan dokumen guna menemukan usia dokumen. sejarawan dapat pula melakukan kritik ekstern dengan mengidentifikasikan tulisan tangan, tanda tangan, materai, atau jenis hurufnya.

Kritik Intern

Kritik intern merupakan penilaian keakuratan atau keotentikan terhadap materi sumber sejarah itu sendiri. Di dalam proses analisis terhadap suatu dokumen, sejarawan harus selalu memikirkan unsur- unsur yang relevan di dalam dokumen itu sendiri secara menyeluruh. unsur dalam dokumen dianggap relevan apabila unsur tersebut paling dekat dengan apa yang telah

terjadi, sejauh dapat diketahui berdasarkan suatu penyelidikan kritis terhadap sumber-sumber terbaik yang ada.

c. Interpretasi (Penafsiran)

Interpretasi adalah menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut hingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Dari berbagai fakta yang ada kemudian perlu disusun agar mempunyai bentuk dan struktur. Fakta yang ada ditafsirkan sehingga ditemukan struktur logisnya berdasarkan fakta yang ada, untuk menghindari suatu penafsiran yang semena-mena akibat pemikiran yang sempit. Bagi sejarawan akademis, interpretasi yang bersifat deskriptif saja belum cukup. dalam perkembangan terakhir, sejarawan masih dituntut untuk mencari landasan penafsiran yang digunakan.

d. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi adalah proses penyusunan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk penulisan sejarah. Setelah melakukan penafsiran terhadap data-data yang ada, sejarawan harus sadar bahwa tulisan itu bukan hanya sekedar untuk kepentingan dirinya, tetapi juga untuk dibaca orang lain. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan struktur dan gaya bahasa penulisannya. Sejarawan harus menyadari dan berusaha agar orang lain dapat mengerti pokok-pokok pemikiran yang diajukan

Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Penelitian Sejarah Lisan

Metode sejarah lisan adalah suatu metode pengumpulan data atau bahan guna penulisan sejarah yang dilakukan sejarawan melalui wawancara terhadap para pelaku sejarah yang ingin diteliti. Di Indonesia metode wawancara dalam penulisan sejarah mulai dikembangkan dengan diawali adanya proyek sejarah lisan yang ditangani oleh badan arsip nasional.

Berkembangnya metode wawancara dalam penulisan sejarah di Indonesia dilatarbelakangi oleh sulitnya menemukan jejak masa lampau berupa dokumen yang sezaman serta makin berkembangnya perhatian studi sejarah yang mengarah ke subyek masyarakat berupa orang kecil dalam peristiwa kecil yang biasanya tidak meninggalkan jejak berupa dokumen.

Wawancara adalah kegiatan melakukan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan keterangan tertentu. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang amat penting dalam penelitian survey selain teknik utama berupa observasi. Oleh karena itu, dalam penelitian survei, teknik wawancara merupakan pembantu utama dari metode observasi.

PEMBAHASAN

Sebelum membahas latar belakang dan tujuan penugasan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendles di wilayah Hindia Timur, perlu diulas kembali mengenai kondisi politik di benua Eropa, yang turut menentukan status pemerintahan kerajaan Belanda. Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Munculah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini menganut ideologi Revolusi Perancis, liberte (kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan), dan menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu pada awal tahun 1795 pasukan Perancis menyerbu Belanda. Pasukan Patriot yang dibantu oleh Perancis (pasukan Wurtemberg) berhasil mendesak Stadhouder Willem V dari Dinasti Oranye. Pada 17 Januari 1795, Willem V berangkat melalui Scheveningen menuju Texel yang selanjutnya mengungsi ke Inggris.

Kaum Patriot yang dibantu oleh pasukan Perancis di bawah pimpinan Jenderal Jean-Charles Pichegru berhasil menguasai kota-kota penting Belanda dan memproklamkan

pembentukan negara baru yang diberi nama Republik Bataaf (Bataavsche Republiek) pada 19 Januari 1795. Beberapa saat kemudian Komite Revolusioner Bataaf mengumumkan diberlakukannya konstitusi baru Republik Bataaf pada 4 Maret 1795. Dalam konstitusi ini disebutkan bahwa bentuk pemerintahan Belanda adalah Republik kesatuan. Dalam konstitusi itu juga disebutkan bahwa pemerintahan dipegang oleh sebuah dewan yang anggotanya diangkat oleh Komite Revolusioner Bataaf. Dewan ini dipimpin oleh mantan pengacara Amsterdam yang bernama Jan Rutgers Schimmelpenninck dengan jabatan *Raadpensionaris*.



Gambar 1. Jenderal Jean-Charles Pichegru (Sumber: Wikipedia)

Sementara itu dalam pengasingan, Raja Willem V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan "Surat-surat Kew". Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada Perancis. Dengan "Surat-surat Kew" itu pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa wilayah daerah di Hindia Timur, seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia.



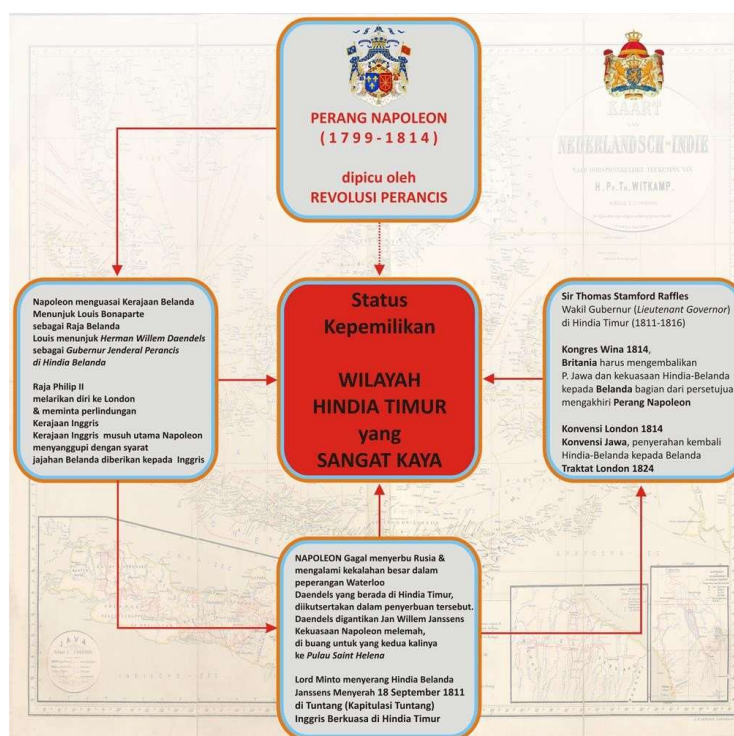
Gambar 2. Raja Willem V (Sumber: www.jmaggs.com)

Pihak Perancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Hindia Timur. Karena Republik Bataaf ini merupakan vassal dari Perancis, maka kebijakan-kebijakan untuk mengatur pemerintahan di Hindia Timur sangat dipengaruhi Perancis. Kebijakan yang utama bagi Perancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat. Pilihan

itu jatuh kepada seorang tokoh muda patriot yang revolusioner, yaitu Herman Willem Daendels. Pada tahun 1803 M, perang kembali berkecamuk di Eropa. Terutama perang antara dua negara imperialis (modern) besar yaitu, Kerajaan Britania Raya (Inggris) dan Kekaisaran Republik Perancis, yang membawa dampak luas pada kondisi di Eropa bahkan di berbagai belahan bumi lain yang menjadi bagian dari wilayah jajahan atau koloni kedua negara imperialis tersebut. Inggris yang lebih kuat di laut (the Role of Waves), merupakan musuh utama Perancis yang lebih kuat di darat. Kedua negara tersebut mempunyai sejarah rivalitas yang cukup panjang, dan saling berlomba untuk menunjukkan superioritas dan hegemoninya, sebagai negara imperialis terkuat, dalam hal kepemilikan wilayah jajahan.

Kondisi ini membawa dampak bagi negara-negara imperialis Eropa lainnya, termasuk kerajaan Belanda. Pada tahun 1804 M, Napoleon Bonaparte menjadi Kaisar, sedangkan saudaranya, Louis (Lodewijk) Napoleon, menjadi raja Belanda-Perancis. Dengan demikian, Kerajaan Belanda menjadi negara vasal Perancis (Negara jajahan Perancis). Hal ini berarti, bahwa semua koloni kerajaan Belanda, secara langsung dan tidak langsung, menjadi milik Perancis. Termasuk wilayah Hindia Timur (P. Jawa).

Louis tidak seperti yang diharapkan Napoléon Bonaparte, ketika pasukan Napoléon menyerebu wilayah Spanyol, pasukannya tidak mampu menaklukkan gerilyawan Spanyol. Dalam rangka menumpasnya, Napoleon mengerahkan pasukan yang besar, dan memerintahkan Louis untuk mengirimkan 3.000 serdadu Belanda. Ketika permintaan ini dipenuhi, kekuatan Belanda yang berjumlah 9.000 pasukan menjadi berkurang. Hal ini diketahui oleh pihak Inggris, kemudian melakukan pendaratan pasukannya di Belanda Utara. Pada bulan Juli 1809 pasukan Inggris yang berkekuatan sebanyak 40 ribu yang diangkut dengan armada sebanyak 264 kapal perang mendarat di pantai barat Belanda. Mereka menduduki Zeeland, dan pulau Walcheren. Setelah terjadi pertempuran sengit selama 17 hari, Inggris berhasil menguasai Vlissingen pada 15 Agustus 1809.



Gambar 3. Skema Sejarah Kolonialisme Inggris di Hindia Timur (Sumber: Kurniawan, 2021).

Akibat kekalahan ini, Kaisar Napoleon menuduh Louis telah berbuat lalai dan menduga sebagai “mata- mata Inggris”. Sejak itu terjadilah konflik antara Napoléon dan Louis. Perselisihan ini semakin meruncing dan mengarah pada gagasan Napoléon untuk

menganeksasi wilayah Belanda dan menyatukannya ke dalam wilayah Perancis. Louis yang mendengar rencana tersebut mengajukan keberatan. Alasan Louis adalah bahwa Belanda tetap memiliki hak sebagai negara merdeka, bukan sebagai negara boneka Perancis. Napoléon memandang bahwa menurut lokasi geografisnya, Belanda merupakan pintu gerbang menuju Perancis bahkan ke daratan Eropa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bagi Napoléon lebih tepat apabila Belanda langsung dikendalikan dari Paris untuk memudahkan koordinasi dalam strategi pertahanan militernya.

Ketika Napoléon tidak melihat jalan keluar lain untuk mengatasi hal ini, pada tanggal 9 Juli 1810 dia memerintahkan pasukan Perancis memasuki Amsterdam dan mendudukinya. Keesokan harinya Napoléon mengumumkan bahwa sejak tanggal 10 Juli 1810 Belanda menjadi bagian dari Perancis. Dengan pernyataan tersebut, Louis tidak lagi menjabat sebagai raja Belanda-Perancis setelah sistem pemerintahan kerajaan Belanda dihapuskan.

Berita tentang penghapusan kerajaan Belanda ini diterima secara resmi oleh Gubernur Jenderal Daendels di Batavia pada bulan Februari 1811 melalui surat yang dikirimkan oleh Menteri Angkatan Laut dan Koloni. Sebenarnya, Daendels telah menerima berita aneksasi Belanda ini melalui pelaut-pelaut Amerika dan dari berita di koran. Dengan demikian, ia semakin yakin bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, Inggris pasti akan menyerang pulau Jawa. Untuk menghadapi ancaman Inggris itu, ia menyusun strategi pertahanan dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa.

Dampak peperangan di Eropa (rivalitas Prancis-Inggris) juga sampai ke kawasan Asia, khususnya wilayah Asia Tenggara, di mana Inggris (EIC) yang saat itu sudah memiliki koloni di India telah sampai hingga kawasan Semenanjung Malaya (wilayah negara Malaysia dan Singapura sekarang). Hal ini merupakan sinyal bahwa wilayah Hindia Timur akan segera diduduki atau dikuasainya. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa apa yang terjadi di benua Eropa berdampak terhadap nasib wilayah Hindia Timur.

Rivalitas antara keduanya tampak ketika Inggris, yang sudah mempunyai koloni di India, telah berada di kawasan Semenanjung Malaya. Malaysia serta Singapura berhasil dijadikan basis kekuatan militer Inggris di kawasan Timur Asia tersebut. Hal ini berarti, bahwa jajahan Belanda di Hindia Timur sangat terancam direbut oleh Inggris. Ancaman tersebut semakin serius, setelah Napoleon Bonaparte melancarkan system kontinental terhadap Inggris, yaitu politik blokade laut terhadap Inggris di Eropa yang memutuskan hubungan antara Inggris dengan dunia luar.

Dalam keadaan kalut tersebut, hubungan Hindia-Timur dengan benua Eropa menjadi terputus. Pemerintahan kolonial Belanda-Perancis sadar bahwa sangat mustahil mengirim bantuan ke Batavia. Upaya yang paling efektif dilakukan adalah mengutus seorang Gubernur Jenderal yang dapat bertindak lebih, artinya dapat berbuat sesuatu dengan cepat untuk mengantisipasi kemungkinan serangan Inggris ke Nusantara (terutama P. Jawa, yang merupakan pusat pemerintahan kolonial). Tokoh yang tepat untuk menjalankan tugas berat ini adalah Herman Willem Daendels. Meester in de Rechten Herman Willem Daendels lahir di Hattem, Gelderland, Republik Belanda, 21 Oktober 1762 – meninggal di Elmina, Belanda Pantai Emas, (Ghana-Afrika) pada 2 Mei 1818 pada usia 55 tahun akibat serangan malaria.

Beliau adalah seorang politikus Belanda yang merupakan Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 – 1811. Daendels seorang Belanda bekas advokat yang cerdas, disiplin, patriotis, jenderal, ahli dalam strategi pertahanan militer, serta pengagum Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1780 dan 1787 bergabung dengan para pemberontak di Belanda dan kemudian melarikan diri ke Perancis. Di sana ia menyaksikan dari dekat Revolusi Perancis dan lalu menggabungkan diri dengan pasukan Batavia yang republikan. Akhirnya mencapai pangkat Jenderal dan pada tahun 1795, ia masuk kembali ke Belanda dan bergabung dengan tentara Republik Bataaf dengan pangkat Letnan- Jenderal. Pada bulan Maret, Daendels berangkat secara diam-diam (ada kemungkinan agar tidak diketahui pihak Inggris) melalui Paris, kemudian

ke Lisabon dengan menaiki kapal Amerika dan mengubah namanya menjadi Van Vlierden, berlayar menuju Kepulauan Canari (Afrika), selanjutnya ke P. Jawa.

Pada tanggal 1 Januari 1808, setelah menempuh perjalanan selama 10 bulan, Daendels mendarat di Anyer hanya didampingi oleh seorang ajudannya, dan tanpa memiliki surat-surat kepercayaan. Dari Anyer dia melalui jalan darat menuju ke Batavia untuk menemui gubernur jenderal saat itu, yaitu Henricus Albertus Wiese. Tampaknya Wiese telah menerima berita pengangkatan Daendels. Pada tanggal 14 Januari 1808 Wiese menyerahkan kekuasaannya kepada Daendels.

Kedua tugas ini diberikan kepadanya mengingat bahwa pada saat itu Belanda berada di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte, dan Inggris adalah salah satu negara yang belum bisa ditaklukkan Prancis yang saat itu. Pada tanggal 28 Januari 1807 Daendels menerima tugas untuk menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Timur langsung dari Louis Napoleon atas perintah dari Napoleon Bonaparte. Persiapan keberangkatannya pun dilakukan. Pada tanggal 9 Februari 1807, Louis Napoleon menandatangani instruksi yang harus dilakukan oleh Daendels. Instruksi itu terdiri atas 37 pasal.

Tugas utama Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Timur, karena alasan politik dan ekonomi. Daendels dihadapkan pada berbagai persoalan ekonomi yang tidak mendukung kebijakannya (karakter pemerintahan kolonial Belanda-VOC yang buruk), serta persoalan sosial-politik yang dianggap dapat menghambat tugasnya. Tugas-tugas Daendels berada dibawah perintah langsung serta pengawasan Kementerian Jajahan (ministerie van kolonien) yang dipimpin oleh Paulus Van der Heim.

Masa Pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels 1808 – 1811

Marschalk Herman Willem Daendels ditugaskan oleh raja Louis Napoleon menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Timur, atas nama pemerintah Republik Kekaisaran Perancis. Selama masa pemerintahannya mendapat beberapa julukan “Marsekal Besi”, “Jenderal Guntur”, dan “Mas Galak”. Daendels adalah kaum patriot dan liberal, yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia Timur. Ia ingin memberantas praktik feodalisme agar masyarakat lebih produktif untuk kepentingan Negara, dan mengantisipasi penyalahgunaan kekuasaan dan membatasi hak – hak bupati atas tanah dan tenaga rakyat.

Tugas pokok Daendles

Mempertahankan P. Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris, dengan strategisebagai berikut:

1. Melakukan Pembangunan Fisik (Sarana dan Prasarana Pertahanan Militer)

- a. Membangun pabrik senjata
- b. Membangun benteng pertahanan
- c. Melakukan perekrutan terhadap kaum pribumi untuk menjadi tentara (moblisasi)
- d. Membangun pangkalan armada laut di Anyer dan Ujung Kulon
- e. Membangun jalan raya dari Anyer (Banten) sampai Panarukan (Jawa Timur) sepanjang 1.000 km, yang kemudian terkenal dengan sebutan “Jalan Raya Daendels” (de Groote Postweg)

2. Melakukan Pembangunan Ekonomi

- a. Memungut pajak hasil bumi dari rakyat (contingenten)
- b. Menjual tanah negara kepada pihak swasta asing
- c. Mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi (Preanger Stelsel)
- d. Mewajibkan rakyat pribumi untuk menjual hasil panennya kepada Belanda dengan harga murah (verplichte leverentie).

Kebijakan Pemerintahan Gubernur Jenderal Marschalk Herman Willem Daendels

Telah diuraikan di atas bahwa tugas Herman Willem Daendles di Hindia Timur mendukung kebutuhan perang kekaisaran Perancis dan pemerintahan kolonial Belanda-Perancis, baik secara militer maupun finansial. Tugas ini menuntut langkah cepat untuk merealisasikannya. Karena karakteristik kepemimpinannya yang liberal, Daendels sering disebut sebagai Gubernur Jenderal ber-“tangan besi”. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diapliskan selama masa pemerintahannya.

1. Reorganisasi Militer di Hindia Timur

Dalam upaya menghadapi ancaman serangan Inggris, pemerintah Batavia melakukan reorganisasi militer, yaitu reorganisasi angkatan laut dan reorganisasi angkatan darat. Reorganisasi angkatan laut dilakukan dengan mengirimkan beberapa kapal secara bertahap ke Hindia Timur, sementara reorganisasi angkatan darat baru dilakukan setelah Daendels tiba dan berkuasa.



Gambar 4. Marschalk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Kolonial di Hindia Timur Atas Nama Pemerintah Republik Kekaisaran Perancis (Sumber: Berbagai Sumber).

2. Reorganisasi Armada Laut

Rezim Napoléon memprioritaskan faktor keamanan dan pertahanan di semua wilayah yang dikuasainya. Oleh karena itu, wilayah-wilayah strategis harus diperhatikan dan dipertahankan seperti Tanjung Harapan, Mauritius di Isle de France, dan Ceylon. Ketika VOC berkuasa, wilayah-wilayah itu dihubungkan dengan armada dagangnya yang dipersenjatai. Sementara itu Prancis menekankan pada aspek militernya dalam menghadapi blokade laut Inggris.

Setelah tanggal 1 Januari 1800, Gubernur Jenderal saat itu, Van Overstraten, mengubah status semua pejabat tinggi dan pejabat Belanda dari pegawai VOC menjadi pegawai negara. Beberapa wilayah di Hindia Timur pada pergantian abad sudah dikuasai oleh Inggris kecuali Jawa, Ternate, Manado, Makassar dan sekitarnya, bagian selatan pulau Timor, Palembang dan kantor Banjarmasin yang masih dikuasai oleh Belanda. Setelah perubahan status itu, pada 23 Agustus 1800 dilaporkan bahwa lima armada Inggris menguasai Teluk Batavia setelah menguasai

pulau Onrust dan Kuiper dengan menghancurkan semua kapal yang berlabuh di sana. Kapten Ball mengirimkan perwira angkatan laut menemui gubernur jenderal untuk menyampaikan perintah atasannya, Laksamana Muda P. Reinier, agar bersedia untuk menyerah tapi Gubernur Jenderal Van Overstraten menolaknya, sehingga armada Inggris melakukan blokade laut atas pulau Jawa sambil menunggu kedatangan armada Inggris lainnya. Upaya menyerang Batavia terjadi lagi pada bulan Oktober 1800. Inggris berhasil mendaratkan pasukannya di muara Marunda. Namun, pada tanggal 9 November 1800, armada Inggris harus meninggalkan Marunda setelah mendapatkan perlawanan dari pasukan Belanda di bawah pimpinan Gubernur Pantai Timur Laut Jawa Nicolas Engelhard.

Untuk sementara waktu tidak ada penyerangan dari pihak armada Inggris, karena di Eropa telah terjadi kesepakatan damai antara Inggris dan Prancis yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1802 di kota Amiens. Laksamana Dekker yang habis kontrak kerjanya pada awal tahun 1804, harus segera meninggalkan P. Jawa sebelum tanggal 15 Oktober 1803. Namun, keberangkatan Dekker dicegah oleh Gubernur Jenderal karena berdasarkan berita dari koran Amerika yang diterimadi Batavia, Inggris telah mengumumkan perang kembali dengan Prancis dan Republik Bataaf. Atas dasar inilah Dekker diminta untuk tetap berada di Batavia, akan tetapi Dekker menolaknya dan berniat kembali ke Eropa. Setibanya di Ile de France pada tanggal 3 Nopember 1803, ia bergabung dengan Laksamana Mist dan Laksamana Jan Willem Janssens. Dekker diminta untuk kembali ke Batavia, sementara De Mist dan Janssens melanjutkan perjalanannya menuju Tanjung Harapan dengan dikawal oleh tiga kapal perang yang bersenjata lengkap. Namun, Dekker menolaknya, karena di P. Jawa, dia akan menjadi anak buah Laksamana Hartsinck yang pangkatnya lebih rendah dari dirinya.

Laksamana Muda Hartsinck tiba di Jawa dengan menggunakan kapal kompeni lama dan dikawal oleh dua kapal yang dikirimkan dari Tanjung Harapan oleh Laksamana de Mist. Dengan demikian, jumlah kapal yang berada di Hindia Timur sebanyak 13 kapal. Pada tanggal 12 Desember 1803, datanglah Laksamana Linois di pelabuhan Batavia dengan membawa 200 orang tentara Prancis. Bersama dengan pasukan ini ikut serta Jenderal de Gosson beserta staf perwira tinggi yang berjumlah 40 orang. Ia menyatakan bahwa dirinya diberi tugas oleh Premier Consul untuk memimpin pasukan Prancis di Jawa di Hindia Timur. Namun, pemerintah di Batavia menolaknya karena ia tidak dapat menunjukkan surat tugasnya. Batavia menerima 200 bantuan tentara Prancis, sementara Jenderal de Gosson dan stafnya dikirimkan kembali ke Isle de France di kepulauan Mauritius. Ketika Gubernur Jenderal Sieberg dan anggota Dewan Hindia meminta tambahan pasukan, Laksamana Linois menolaknya.

Blokade laut atas pulau Jawa yang dilakukan oleh armada Inggris terus dilakukan. Pada tanggal 18 Oktober 1806, sebuah kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia. Kapal ini kemudian merampok sebuah kapal layar dan sebuah fregat. Satu bulan kemudian, tanggal 26 November 1806, tujuh kapal Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Sir Edward Pellew muncul di Laut Jawa. Pellew menerima instruksi, yang disampaikan melalui armada lainnya yang baru bergabung, untuk menghancurkan semua armada Belanda yang berada di sekitar laut Jawa. Ketika Pellew akan mendaratkan armadanya di Batavia, di pelabuhan Batavia terdapat 20 kapal dagang dan 8 kapal perang yang sedang berlabuh di pelabuhan itu. Akhirnya Pellew mengerahkan 18 buah armada perangnya untuk menghancurkan semua kapal yang berlabuh di pelabuhan Batavia. Pellew tiak melanjutkan misinya dengan pendaratan, tetapi terus melakukan patroli di laut Jawa. Pada bulan April kembali armada Inggris merampas empat kapal dagang Belanda. Kondisi ini menyebabkan Laksamana Hartsinck mengundurkan diri. Namun, ia meninggal pada tanggal 8 Juli 1808 di Baltimore, Amerika Serikat dalam perjalanan pulang ke Belanda. Patroli Armada Inggris juga berhasil mencegat kapal Perang Belanda Scorpio yang sedang mengawal kapal dagang dari Batavia ke Semarang. Pellew juga berhasil menangkap korvet Belanda yang dilengkapi dengan 20 meriam di pelabuhan Semarang.

Pada bulan Desember 1807, delapan armada Pellew berada di pelabuhan Gresik, Surabaya. Ia mengirim sebuah rakit yang ditumpangi oleh beberapa perwira untuk menyampaikan surat kepada komandan pelabuhan Gresik, Kapten Cowell. Isi surat itu antara lain bahwa Inggris tidak akan menyerang apabila pemerintah di Surabaya bersedia menyerahkan kapal-kapal itu. Namun, komandan keamanan di Surabaya justru menangkap mereka. Insiden ini menimbulkan kemarahan Pellew yang mendaratkan 1.400 orang marinirnya untuk menguasai Surabaya. Insiden dikuasanya kota Surabaya oleh tentara Inggris menimbulkan ketegangan bagi para penguasa Belanda di Surabaya. Setelah disepakatinya perdamaian antara penguasa Batavia dan Laksamana Pellew, Pellew menarik pasukannya dengan menyita semua armada laut Belanda. Dengan demikian penguasa Ujung Timur pulau Jawa tidak lagi memiliki armada laut. Hal ini berarti habislah kekuatan laut pemerintahan Belanda di Hindia Timur.

3. Reorganisasi Angkatan Darat

Menjelang dibubarkannya VOC, kondisi angkatan darat Belanda di Hindia Timur sangatlah buruk, dikarenakan kurang terlatih, persenjataannya tidak lengkap, dan gajinya sangat rendah, banyak diserang penyakit, desersi. Alasan mereka meninggalkan induk pasukannya karena merasa rindu dengan anak dan isterinya. Mereka dibayar dengan gaji rendah, yang mengakibatkan menurunnya semangat juang. Sementara itu, pasukan di Jawa bagian timur dipusatkan di Surabaya.

KESIMPULAN

Perang di Eropa juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan di Hindia-Belanda. Ketika Napoleon Bonaparte berkuasa di Prancis, Belanda yang kalah perang, berada di bawah kekuasaan Prancis dari tahun 1806 sampai tahun 1813. Napoleon menempatkan adiknya, Louis Bonaparte menjadi Raja di Belanda. Perubahan situasi di Eropa juga berimbas ke kawasan Asia Tenggara, di mana terdapat persaingan dagang antara Belanda dan Inggris.

Louis Bonaparte mengangkat salah seorang perwira tingginya, Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Hindia-Belanda. Daendels sebenarnya adalah seorang pengacara Belanda dan memimpin gerakan melawan Willem V dari Oranien. Setelah gerakannya dihancurkan, ia melarikan diri ke Prancis dan bergabung dengan tentara revolusi dan ikut mengambil bagian dalam penyerbuan Prancis ke Belanda tahun 1793. Tahun 1799 ia mencapai pangkat Letnan Jenderal. Untuk memperkuat pertahanan serta mempercepat gerakan pasukannya, Daendels membangun jalan dari Anyer di ujung barat Jawa Barat, sampai Panarukan di ujung timur Jawa Timur. Dalam pembuatan jalan tersebut, rakyat di pulau Jawa yang menjadi korban, karena pada dasarnya, mereka dipaksa untuk bekerja dengan kondisi yang sangat berat, sehingga pembangunan jalan tersebut yang memerlukan waktu sekitar empat tahun, diperkirakan telah menelan korban jiwa ribuan rakyat di Jawa, dan membawa kesengsaraan bagi keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya kekuasaan Daendels dilanjutkan oleh penerusnya Jan Willem Janssens.

Disamping praktek penjajahan oleh kolonial Belanda-Prancis dipulau Jawa, Inggris juga sempat melakukan praktek penjajahan di pulaiu Jawa. Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound, 1st Earl of Minto, Viscount Melgund Of Melgund, di Indonesia dikenal sebagai Lord Minto, Gubernur Jenderal Inggris di India (1807 – 1813), memimpin armada Inggris menyerbu Jawa, dan pada 6 Agustus 1811, bersama Thomas Stamford Raffles, pasukan Inggris mendarat di Jawa, tanpa suatu perlawanan yang berarti dari tentara Belanda-Prancis, tentara Inggris menduduki pulau Jawa dan kemudian menguasai seluruh wilayah Belanda-Prancis. Pada 11 September 1811 Raffles, yang waktu itu baru berusia 30 tahun, diangkat menjadi Letnan Gubernur Jenderal untuk India-Belanda. Itulah awal penjajahan Inggris di Indonesia, yang juga disebut sebagai The British Interregnum.

Ketika kekaisaran Perancis berhasil mengalahkan Belanda secara otomatis (berdasarkan logika sederhana), wilayah jajahan atau kekuasaan Belanda berpindah atau menjadi milik Perancis. Begitu pula ketika kekaisaran Perancis kalah oleh pasukan Uni Eropa (yang terkuat; kerajaan Inggris, kekaisaran Prusia dan Rusia), maka wilayah kekuasaan kekaisaran Perancis (dalam hal ini P. Jawa) secara otomatis menjadi milik dari kerajaan Inggris. Seharusnya landasan yang paling mendasar dilakukan pengembalian posisi wilayah berdasarkan peta Wilayah Koloni berdasarkan Peta sebelum datangnya Bangsa-bangsa Imperialis. Karena banyak sekali “penghapusan sejarah” dari bangsa-bangsa tersebut, yang memberi “citra” sangat buruk, yaitu bangsa yang sampai dengan saat ini masih dijajah, karena Bangsa Indonesia masih menggunakan peta wilayah yang merujuk pada peta kolonialisme. Hal ini memberi gambaran, bahwa Bumi Pertiwi ini seolah-olah “wilayah tak bertuan” (No Men’s Land), betapa pedihnya menjadi bangsa yang dianggap “tidak memiliki sejarah”.

Carut-marutnya keadaan di bekas koloni bangsa Eropa, khususnya wilayah NKRI sekarang, sedikit banyak akibat dari “warisan kolonialisme” atau hasil penjajahan yang berdampak jangka panjang, maka dari itu bangsa-bangsa Eropa yang pernah melakukan “penjajahan”, harus mempertanggungjawabkan atas peristiwa di masa silam tersebut, karena kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime against humanity) tidak dapat dikapuskannya. Meskipun harus diakui, ada sedikit pengaruh dan peninggalan dari berbagai kolonialisme bangsa Eropa yang bersifat positif. Sejarah mengajarkan berbagai nilai (value), baik yang bersifat positif maupun negatif. Namun di balik sebuah peristiwa pastilah ada hikmah yang sangat besar, untuk dijadikan renungan dalam menata kehidupan di masa depan.

Dalam berbagai peristiwa sejarah memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) yang menimbulkan peristiwa lainnya (sintesis) yang saling berkaitan. Perang Napoleon yang menyebabkan pembagian wilayah Hindia Timur antara Inggris dan Belanda. Selain itu dapat didalami, bahwa hidup dalam penjajahan bangsa lain, mengakibatkan keputusan tentang nasib dan kedaulatan negara koloni ditentukan oleh bangsa-bangsa lain. Sudah pasti menguntungkan pihak pemerintah kolonial.

Maka dari itu berbagai Perjanjian yang menjadi dasar dari berbagai pembagian wilayah koloni tersebut harus dikaji ulang dengan logika yang jernih (objektif), dan dianalisa secara cermat, berdasarkan penguasaan peristiwa sejarah, kepiawaian diplomasi dan pemahaman sistematika negara berdaulat.

Masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, harus dapat melakukan “Pelurusan Sejarah Bangsa-bangsa”. Hal ini sangat diperlukan guna “menyelesaikan” berbagai persoalan bangsa dan Negara ini. Sudah tidak terhitung korban jiwa, tidak terhitung kekayaan yang diambil dan dirampas oleh negara-negara penjajah. Belum lagi dampak penjajahan jangka panjang yang masih dirasakan sampai saat ini. Berbagai peristiwa tersebut tidak bisa dilupakan begitu saja, maka dengan kajian sejarah terhadap berbagai perjanjian diantara negara-negara kolonial (salah satunya Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda) diharapkan mampu menjawab dan menyelesaikan “hitam-kelamnya” sejarah bangsa Indonesia dan bangsa – bangsa lain yang pernah mengalami penjajahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kardiyat Wiharyanto. 2004. Indonesia Dalam Abad XIX. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Ananta Toer, Pramoedya, 2012. Jalan Raya Pos, Jalan Daendels Lentera Dipantara.

Aziz, Maleha, Dra, 2005, Hj.Ikhtisar Sejarah Indonesia III Untuk Mahasiswa, FKIP UNRI, Pekanbaru.

-
- Badrika, I Wayan, 2003, *Sejarah Nasional Indonesia dan Umum 2*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hamid Hasan, 1993, *Said.Materi Pendidikan IPS 2*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta.
- Ikeda, Ryoko.Eroica, 1984, *Jatuhnya Napoleon, Choukoron-Sha dan Orion Literacy Agency*, Tokyo.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto.1984. *Sejarah Nasional Jilid IV*. Jakarta: Balai Pustaka
- Merle Calvin Ricklefs. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.
- Parakitri T. Simbolon. KOMPAS. 1995. *Menjadi Indonesia, Buku I: Akar-akar Kebangsaan Indonesia*.Jakarta: KOMPAS – Grasindo.
- Ricklefs M.C, 2001, *A History of Modern Indonesia c. 1200*. Third Edition. Basingstoke: Palgrave, Stanford University Press.
- Sartono Kartodirdjo. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Soetrisno, Eddy, 2004, *Ensiklopedi Populer Seri Senior*, Taramedia dan Restu Agung, Jakarta.
- sejarahbudayanusantara.weebly.com/inggris, di akses 5-10-2022
- www.nederlandsindie.com/daend...infrastruktur di akses 6-10-2022
- www.rnw.nl/bahasa-indonesia/a...jalan-daendels di akses 6-10-2022